



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA**

**TESIS**

**ASPEK PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI JASA LELANG  
ONLINE OLEH BALAI LELANG SWASTA DI INDONESIA**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Sains (M.Si) Dalam Ilmu Administrasi**

**Oleh  
Nama : Devy Siswandyani  
NPM : 6905030774  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan**

**JAKARTA  
2008**

**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES  
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIONS  
POST-GRADUATE PROGRAM  
STUDY PROGRAM OF ADMINISTRATIONS  
CONCENTRATION OF ADMINISTRATIONS AND TAX POLICIES**

**ABSTRACT**

**DEVY SISWANDAYANI  
6905030774**

**THE ASPECTS OF TAX IN ONLINE AUCTION SERVICE  
TRANSACTION BY PRIVATE AUCTION HOUSES IN INDONESIA**

xvi + 100 Pages + 2 Tables + 1 Figure

References: 45 literatures, 11 articles, 22 other sources (1898-2008)

The greatest resource of national income is tax and it is ever increasing over years. The national government, in making tax policies, should be able to adapt its position to and anticipate new changes by always cultivating any potential tax that remains hidden and not taxable so far. A potential one may cultivate to help increase the national income is those who earn revenues from the auction transaction.

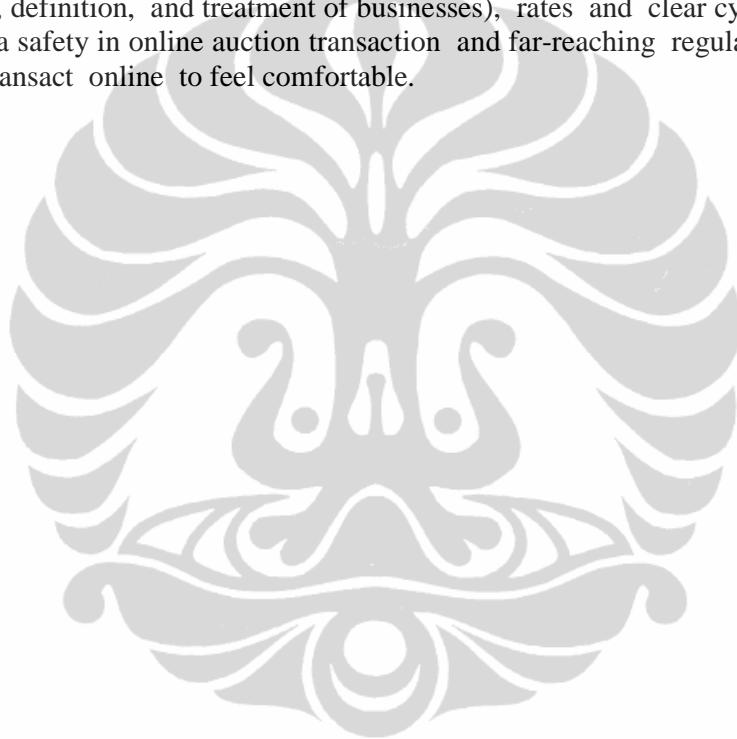
The national government has observed some broad markets for transaction of privately-owned goods and that existence of the Private Auction Houses will realize ideal, efficient, transparent and competitive concepts. These concepts are adjustable to free-trade which requires transparency and professionalism. Moreover, services that the Private Auction Houses provide include sales of goods that belong to other people on auction base such as repairs, appraisal, marketing and many others. For any service they provide, the Private Auction Houses receive fee in return from the owner of goods.

Problem of this thesis is identifying determinants of Income Tax and Value Added Tax that the Private Auction Houses apply to the transaction of online auction services.

Research method used in this thesis is descriptive analysis, with qualitative approach. The collecting data through library research and field study by interviewing key informants and depth observations.

In conclusion, research findings indicate that the Private Auction Houses play parts in increasing loyalty of Tax Payers to meet their tax liabilities and reduce risks of tax evasion and thus improve national income in more optimum manner.

It is suggested that the Private Auction Houses should recognize promotion-based auction concept in order to prevent them from worrying to manage transactions and otherwise, the national government should make, as well, regulation of taxable online auction transaction especially throughout Private Auction Houses more specifically in physical forms (such as procedures of taxation, definition, and treatment of businesses), rates and clear cyberlaws; a rule of data safety in online auction transaction and far-reaching regulation for those who transact online to feel comfortable.



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

**ABSTRAK**

DEVY SISWANDAYANI  
6905030774

ASPEK PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI JASA LELANG *ONLINE*  
OLEH BALAI LELANG SWASTA DI INDONESIA

xvi + 100 Halaman + 2 Tabel + 1 Gambar  
Daftar Pustaka : 45 buku literatur, 11 artikel, 22 literatur lainnya (1898-2008)

Sumber penerimaan negara terbesar adalah berasal dari sektor perpajakan dan besarnya penerimaan pajak ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah dalam membuat kebijakan perpajakan dituntut untuk mampu menyelaraskan diri dan harus mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan baru dengan terus berupaya menggali potensi-potensi perpajakan yang selama ini masih tersembunyi atau luput dari pengenaan pajak. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan penerimaan negara adalah adanya pihak yang memperoleh penghasilan pada peristiwa pelelangan.

Pemerintah melihat pasar yang luas bagi transaksi barang-barang milik swasta dan dengan adanya Balai Lelang Swasta (BLS) konsep lelang yang ideal seperti efisien (cepat), terbuka (transparan), dan kompetitif (harga bersaing) bisa diwujudkan. Konsep ini sesuai dengan konsep pasar bebas yang menuntut transparansi dan profesionalisme. Sedangkan jasa yang diberikan oleh balai lelang swasta adalah jasa menjualkan barang milik orang lain secara lelang, jasa tersebut meliputi jasa perbaikan, jasa nilai, jasa pemasaran dan lain sebagainya. Atas jasa yang diserahkannya tersebut, Balai Lelang mendapat penggantian (*fee*) dari pemilik barang.

Masalah pokok tesis ini adalah untuk mengetahui ketentuan Pajak

Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini mengenai transaksi jasa lelang online oleh Balai Lelang Swasta di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan melalui wawancara dengan key informan dan pengamatan mendalam.

Sebagai kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan peranan Balai Lelang Swasta dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak serta mengurangi resiko terjadinya *tax evasion* sehingga akan menambah pendapatan negara secara lebih optimal.

Disarankan agar Balai Lelang Swasta harus memperkenalkan konsep lelang dengan melakukan promosi agar orang tidak merasa ragu dan takut untuk melakukan transaksi melalui Balai Lelang Swasta dan Pemerintah dituntut untuk membuat peraturan pengenaan pajak atas transaksi lelang *online* khususnya yang dilakukan oleh Balai Lelang Swasta lebih spesifik dari segi bentuk fisiknya (antara lain tata cara pelaksanaan maupun prosedur, definisi maupun mengenai perlakuan terhadap pelaku bisnis) maupun tarifnya, serta adanya perangkat hukum yang jelas di bidang *cyberlaw* salah satunya yaitu mengenai peraturan yang menjamin keamanan data dalam setiap pelaksanaan transaksi lelang *online*, serta mengatur tentang peraturan hukum secara menyeluruh sehingga para pihak yang melakukan transaksi merasa nyaman dalam melakukan transaksi melalui bisnis *online*.

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**



**Tesis ini adalah**  
Hasil karya Saya sendiri, dan  
Seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk  
Telah Saya nyatakan dengan benar.

(Devy Siswadayani)

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN

**TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS**

Nama : Devy Siswadayani  
NPM : 6905030774  
Judul Tesis : Aspek Perpajakan Atas Transaksi Jasa Lelang Online Oleh Balai Lelang Swasta Di Indonesia

Menyetujui,  
Pembimbing Tesis

(Drs. Ahmadi Hadibroto., MSc., Ak)

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PANCASARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Devy Siswadayani  
NPM : 6905030774  
Judul : Aspek Perpajakan Atas Transaksi Jasa Lelang Online Oleh  
Balai Lelang Swasta Di Indonesia

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program  
Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Indonesia pada tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu  
delapan dan telah dinyatakan : **LULUS**

**TIM PENGUJI :**

Ketua Sidang:  
Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein (.....)

Pembimbing:  
Drs. Ahmadi Hadibroto., MSc., Ak (.....)

Pembaca Ahli:  
Dr. Safri Nurmantu, M.Si (.....)

Sekretaris Sidang :  
Drs. Achmad Lutfi, M.Si (.....)

## **KATA PENGANTAR**

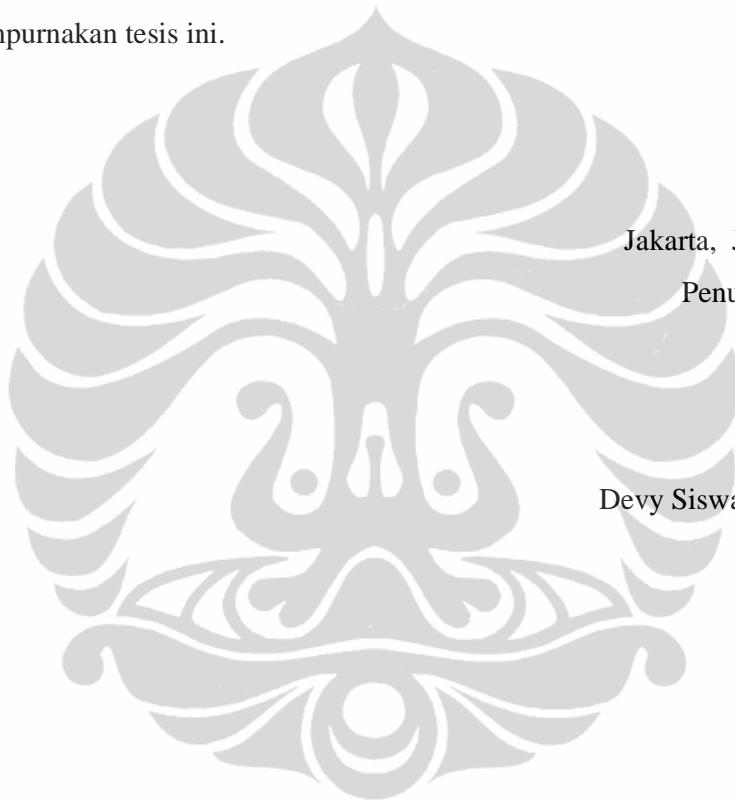
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, maka tesis yang merupakan salah satu syarat kelulusan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan telah dapat diselesaikan.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada :

1. Drs. Ahmadi Hadibroto., MSc., Ak selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis dan menyediakan waktu ditengah kesibukan dan kegiatan beliau , sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
3. Dr. Safri Nurmantu, M.Si selaku penguji ahli yang telah memberikan koreksi yang konstruktif untuk perbaikan.
4. Drs. Achmad Lutfi, M.Si selaku Sekretaris Sidang Penguji Tesis yang telah melakukan koreksi teknis penulisan, demi penyempurnaan tesis.
5. Seluruh staf pengajar, sekretariat dan perpustakaan Program Pascasarjana Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan.
6. Ayahanda Drs. R. Soebroto dan Anies Syah Ibunda tercinta dan kakak-kakaku tercinta Sandy Suryaningrum SE, MM dan Eric Priambodo, yang selalu memberikan dorongan dan doa serta mengingatkan agar menyelesaikan tesis ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa angkatan XI B yang senantiasa memberikan

- masukan dan informasi dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat menyempurnakan tesis ini.



Jakarta, Juli 2008

Penulis

Devy Siswadayani

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRACT</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN TESIS</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN TESIS</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	7
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	7
D. Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Literatur	10
1. Lelang	10
1.1. Pengertian Lelang	10
1.2. Fungsi Lelang	12
1.3. Asas Lelang	13
1.4. Sifat Lelang	14
2. Pajak	16
2.1. Pengertian Pajak	16
2.2. Sistem Perpajakan	19
2.3. Asas Pemungutan Pajak	23

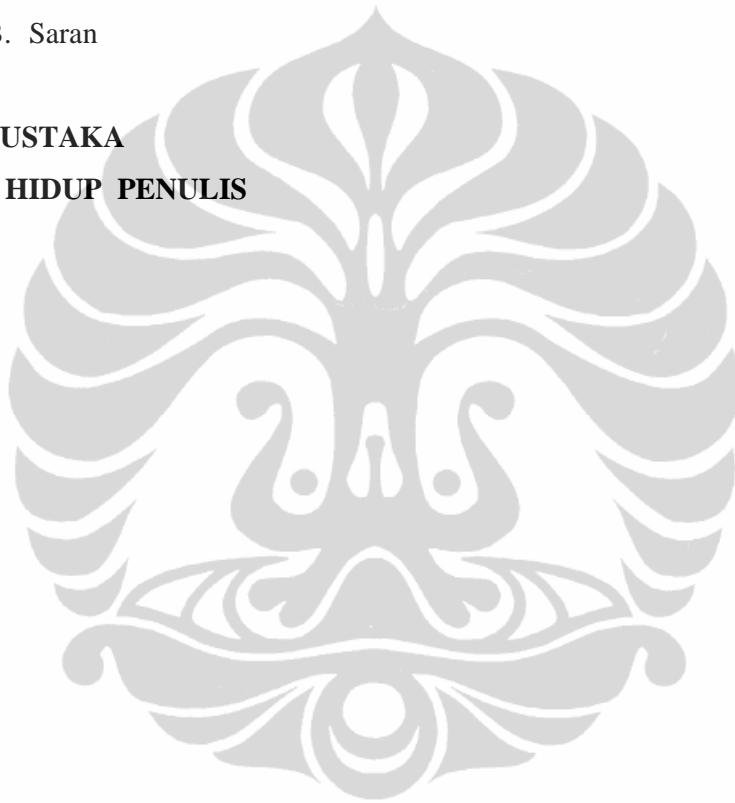
2.4. Sistem Pemungutan Pajak	26
2.5. Kepatuhan Perpajakan	27
2.6. Definisi Penghasilan	31
2.7. Pajak Penghasilan Final	34
2.8. Bea Perolehan Hak Tanah dan atau Bangunan (BPHTB)	37
2.8.1. Pengertian	37
2.8.2. Subjek Pajak	37
2.8.3. Objek Pajak	37
2.8.4. Tarif Pajak	39
2.8.5. Dasar Pengenaan BPHTB	39
2.8.6. Pengenaan BPHTB	40
2.8.7. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak NPOPTKP	40
2.8.8. Saat, Tempat dan Cara Pembayaran Pajak Terutang	41
2.8.9. Cara Penghitungan BPHTB	42
2.9 Pajak Penghasilan Pasal 23	45
2.9.1. Pengertian	45
2.9.2. Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23	45
2.9.3. Tarif dan Objek PPh Pasal 23	45
2.9.4. Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23	48
2.9.5. Saat Terutang, Penyetoran, dan SPT Masa PPh Pasal 23	49
2.9.6. Bukti Pemotong PPh Pasal 23	50
2.10.Faktur Pajak	50
B. Kerangka Pemikiran	52
C. Metode Penelitian	53
1. Pendekatan Penelitian	53

2. Jenis Penelitian	55
3. Teknik Pengumpulan Data	55
4. Nara Sumber/Informan	56
5. Proses Penelitian	56
6. Penentuan Lokasi dan Objek Penelitian	57
7. Batasan Penelitian	57
8. Keterbatasan Penelitian	57
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	<b>58</b>
A. Sejarah	58
1. Sejarah Lelang	58
2. Sejarah Balai Lelang	59
3. Sejarah Perkembangan Bisnis Lelang <i>Online</i>	60
B. Dasar Hukum Lelang	62
C. Balai Lelang	65
1. Pengertian Balai Lelang	65
2. Ijin Operasional	67
3. Pelaksanaan Lelang	71
3.1. Pra-lelang	71
3.2. Saat Lelang	75
3.3. Pasca Lelang	76
4. Hak, Kewajiban dan tanggungjawab Balai Lelang	80
5. Risalah Lelang	80
6. Pelaku Bisnis Lelang	83
6.1. Pemohon/ Penjual	83
6.2. Peserta Lelang/ Pembeli	85
6.3. Pembeli Lelang	86
D. Prospek Lelang di Indonesia	87
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	<b>89</b>
A. Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan dalam Transaksi	

Jasa Lelang oleh Balai Lelang Swasta	89
B. Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Transaksi Jasa Lelang oleh Balai Lelang Swasta	95
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>98</b>
A. Simpulan	98
B. Saran	99

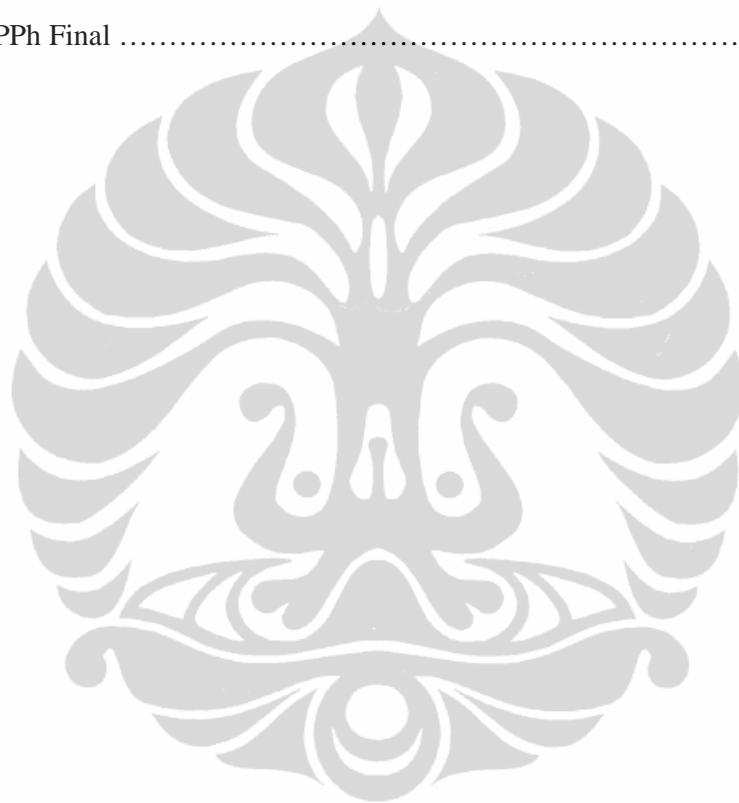
**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**



## **DAFTAR TABEL**

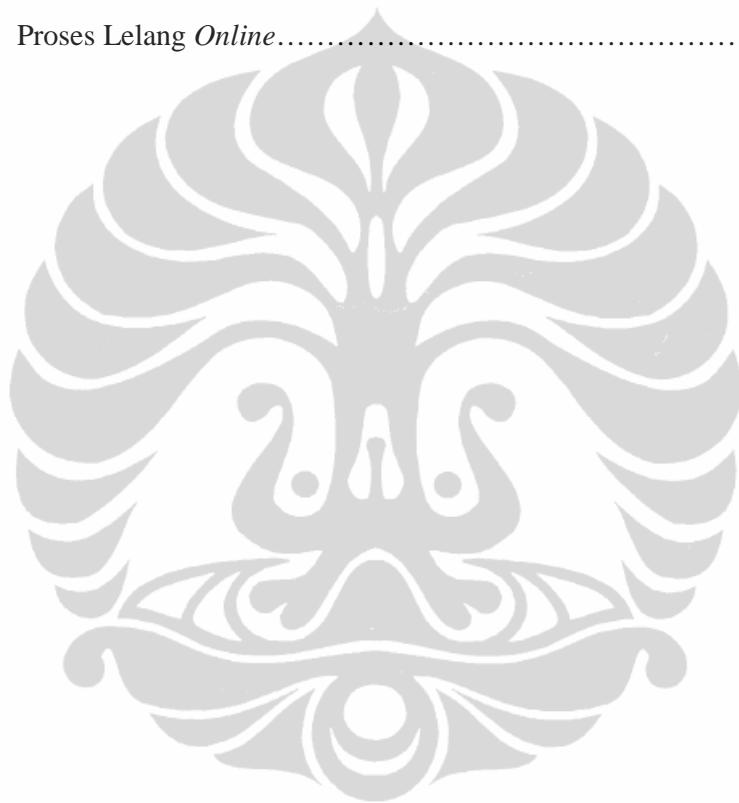
	Halaman
Tabel I.1 Penerimaan Pajak 2002- 2007 (Dalam triliun rupiah).....	1
Tabel II.2 PPh Final .....	35



## **DAFTAR GAMBAR**

Halaman

Gambar I.1 Proses Lelang *Online*..... 79



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

